

Lampiran :

No : **065/ 178.1 /1.11/2023**

Tanggal : 12 April 2023

INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Bagian Tata Pemerintahan
- Tujuan : Tersedianya Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)
- Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan Kerja sama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintah dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; dan
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaporkan data/isian kewenangan urusan}}{\text{Jumlah OPD pengampu urusan LPPD}} \times 100\%$	Data LPPD Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>a. Tersedianya Dokumen LPPD</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Waktu Pengiriman LPPD Perangkat Daerah Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan - Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 - Capaian kinerja Kabupaten merupakan agregasi dari capaian kinerja OPD se- Kabupaten Jember yang perlu dikoordinasikan terkait validitas data - Seluruh elemen data harus bersumber dari kinerja masing-masing OPD buka data BPS kecuali data PDRB dengan dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten untuk didokumentasikan - Pemingkatan nilai LPPD berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) daerah dan Pusat - Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya 		

Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan sesuai ketentuan}} \times 100\%$	Data Capaian Administrasi Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Administrasi Tata Pemerintahan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/Kelurahan - Rapat Rakor Camat - Laporan PATEN Kecamatan - Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim - Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan peraturan (PP 94 Tahun 2021) - Camat yang menempati rumah dinas di wilayah kerjanya - Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya - Jumlah kasus pelanggaran disiplin kerja yang terjadi (semakin menunjukkan disiplin kerja dapat berjalan) dan tingkat disiplin kerja meningkat 2. Rapat Rakor Camat <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Rapat Koordinasi Camat dalam rangka menindaklanjuti keadaan dinamis yang berkembang di lapangan, sosialisasi kebijakan pemerintahan di wilayah kecamatan 3. Laporan PATEN Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kecamatan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan ,waktu layanan feasible) - Kebijakan kecamatan yang mendukung pelaksanaan 		

		<p>PATEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan lintas OPD dalam koherensi dan sinkronisasi pelayanan terpadu di kecamatan <p>4. Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Upacara HUT Jember dan HUT Jatim <p>5. Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Rupabumi/Toponimi yang masuk dalam aplikasi SINAR BIG (Badan Informasi Geospasial) 		
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan}} \times 100\%$	Data Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah - Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI - Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO - Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah. <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <p>1. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata laksana kerjasama daerah sesuai dengan aturan yang masih berlaku (Permendagri 22 tahun 2020) - Kerjasama sama dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik antar daerah dan pihak ketiga - Kerjasama dilakukan dengan terlebih dahulu menyepakati nota kesepahaman (MOU) yang secara teknis akan diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama 		

		(PKS) yang memuat hal substantive 2. Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI - Terlaksananya kegiatan RAKERWIL APKASI 3. Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO - Partisipasi dalam kegiatan APKASI OTONOMI EXPO 4. Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah. - Terlaksananya rapat dengan TKKSD		
--	--	---	--	--

II. INDIKATOR KINERJA (PENDUKUNG KINERJA UTAMA)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan/pedoman}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: a. Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi yang seharusnya disusun (7 Dokumen) - RKA - DPA - RKPA - DPPA - RENJA - RENJA PERUBAHAN - LAKIP		

		<p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kualitas penyusunan sesuai pedoman dan - tersusun tepat waktu 		
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Keuangan yang Terlaksana sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Administrasi Keuangan yang pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi keuangan yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan (6 item):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja peralatan dan perlengkapan kantor - Belanja Natura dan Pakan Natura - Belanja Perabot Kantor - Belanja Mamin aktivitas lapangan - Belanja tagihan air <p>Dokumen-dokumen tersebut disajikan dalam Rekapitulasi bulanan</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terangngarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangngarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun}}{\text{Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi barang yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perubahan - Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah - Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 		

		<p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Terlaksana sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Administrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi umum yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Pengelola Keuangan - Honorarium Pejabat PBJ - Honorarium tenaga administrasi - Honorarium tenaga kebersihan - Pembayaran internet - Penyediaan pakaian kedinasan (pakaian olah raga, pakai adat) - Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan - Laporan Kunjungan Kerja - Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi <p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		

<p>Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan</p>	<p>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah</p>	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	<p>Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan</p>	<p>KPA PPTK PPK-SKPD</p>
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Pengadaan barang di Bagian Tata Pemerintahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang hasil pengadaan - Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terangankan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangankan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
<p>Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan</p>	<p>Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</p>	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	<p>Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan</p>	<p>KPA PPTK PPK-SKPD</p>
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Penyediaan jasa di Bagian Tata Pemerintahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat - Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terangankan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangankan sesuai ketentuan Pedum APBD 		

Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dan Siap Pakai}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi : - pemeliharaan rutin/ service berkala dan - perbaikan atas kerusakan/ - penggantian spare part b. Barang Milik Daerah yang dipelihara meliputi : - Alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Alat kantor dan rumah tangga - Komputer		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ 485162 JEMBER 68118

KEPUTUSAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 065/ 178.1 /1.11/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER 2023

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026, maka perlu menyesuaikan indikator kinerja utama yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja pendukung Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam mendukung tercapainya kinerja utama Bagian Tata Pemerintahan
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan
- KELIMA** : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Bagian Tata Pemerintahan
 - b. Perencanaan Tahunan Bagian Tata Pemerintahan
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan

KEENAM : Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 12 April 2023

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KABUPATEN JEMBER**



ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19841025 200312 1 003